

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan upaya salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan pembangunan nasional. Sebagai agen *of change*, pendidikan mampu menghidupkan taraf manusia menjadi lebih baik. Dalam kehidupannya, manusia perlu dididik dan mendidik dirinya untuk menjaga kelangsungan dan perkembangan hidupnya secara terus menerus. Salah satu upaya tersebut adalah melalui pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pelaksanaan pendidikan harus menjamin peningkatan mutu pendidikan ditengah perubahan perkembangan zaman yang ada agar manusia menjadi manusia yang bertakwa kepada tuhan yang maha esa, cerdas produktif dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional atau internasional. Untuk mencapai pendidikan tersebut pemerintah telah mengatur delapan standar nasional pendidikan sebagai mana diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Dalam undang-undang republik indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 ayat 1 pasal 1 dijelaskan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak

mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat dan bangsa dan negara.

Secara umum, penyelenggaraan proses pendidikan sebagai upaya menverdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan utama dari lembaga pendidikan. Dalam pencapaian tujuan tersebut tentunya terkait dengan banyak faktor yang diantaranya adalah pengelolaan sarana prasarana pendidikan.

Dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 32 ayat 1 disebutkan dalam standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses kompetensi lulus, tenaga pendidikan sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar saarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkait dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olah raga tempat beribadah, perpustakaan, labolatorium, bengekel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan rekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya standar pendidikan tersebut, sekolah harus dapat mengelola sumber daya yang ada sesuai dengan standar yang telah ditetapkan demi mencapainya tujuan pendidikan. Agar tujuan pendidikan agar terlaksanakan dengan baik, maka kegiatan belajar mengajar yang ada disekolah haruslah berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan apapun.

Dalam proses belajar mengajar, agar peserta didik dapat mengikuti kegiatan belajar mnegajar dengan baik maka harus ditopang dengan pasilitas belajar mengadai yaitu dengan adantya sumber belajar yang berfungsi dengan

baik seperti adanya perpustakaan yang lengkap, serta laboratorium serta bengkel-bengkel kerja dapat menggunakan teknologi informasi. Kegiatan belajar mengajar akan efektif jika ketersediaan sarana prasarana yang ada memadai dan berfungsi dengan baik. Namun hal tersebut tidak cukup karena meskipun sarana prasarana yang ada secara memadai, tetapi pemeliharaan terhadap sarana prasarana tidak dilakukan dengan baik maka nilai guna dan nilai daya dari sarana prasarana tersebut akan menyusut. Hal ini akan mempengaruhi kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Pemeliharaan terhadap sarana prasarana pendidikan merupakan masalah yang terjadi disuatu lembaga pendidikan, dimanakenyataan dilembaga banyak ditemukan bahwa sekolah tidak mampu memelihara sarana prasarana yang dimilikinya sehingga menyebabkan sarana prasarana tersebut rusak dan tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya lagi. Banyak sekolah yang tidak bisa memelihara terhadap sarana prasarana yang dimilikinya sehingga saat sarana prasarana tersebut rusak maka sekolah langsung melakukan penghapusan terhadap sarana prasarana tersebut.

Padahal jika pemeliharaan sarana prasarana dilakukan dengan baik dan berkala, maka tentunya hal ini akan meningkatkan efisiensi dari sarana prasarana yang ada. Pemeliharaan sarana prasarana itu sendiri bertujuan untuk memperpanjang untuk usia kegunaan aset (yaitu setiap bagian dari suatu tempat kerja, bangunan dan isinya) untuk menjamin kebiasaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi atau jasa, untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan alat tersebut.

Sarana prasarana pendidikan merupakan salah satu Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara suatu pendidikan, sehingga melengkapi sarana prasarana menjadi hal yang mutlak. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 45 Ayat 1 yang berbunyi : “setiap satuan formal dan nonformal menyediakan sarana prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Hal tersebut juga di perkuat dengan peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 Bab VII pasal 42 ayat 1 bahwa “ setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Dalam UU sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 pada BAB XIII mengenai pedanaan Pendidik, bagian ketiga tentang pengelolaan Dana pendidik pasal 48 ayat (1) dinyatakan bahwa pengelolaan dana pendidik berdasarkan pada prinsip keadilan, Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas Artinya pengelolaan dalam Pendidik yang berawal dari pemerintah maupun masyarakat harus dilandasi dengan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi. Kedua jenis pertanggungjawaban tersebut merupakan bentuk akuntabilitas yang harus dilakukan pemerintah kepada sekolah.

Akuntabilitas merupakan kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karna kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan

yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Selain akuntabilitas juga harus adanya transparansi yang dilakukan pemerintah terhadap semua yang berkaitan dengan Dana operasional sekolah (BOS).

Transparansi merupakan adanya keterbukaan, transparansi di bidang pengelolaan berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang pengelolaan keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan, dan pertanggungjawaban harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu, transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antar pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Pemberian informasi ini merupakan bentuk transparansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana operasional sekolah (BOS).

Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) yang transparan dan akuntabel akan memberikan dampak positif untuk pemerintah dan sekolah,

karena akuntabilitas akan menunjukkan seberapa baik kinerja seseorang dalam menjalankan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, pencegahan penyelewengan keuangan sekolah, dan akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan sekolah. Berdasarkan artikel yang telah dilansir yang bersumber dari berita online menuturkan bahwa salah seorang oknum kepala SD Negeri Karang Anyar sekaligus Kepala Sekolah SD Negeri Cikarang 2, Kecamatan Jampang Kulon Korupsi (Tipikor) Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat. Daw diperiksa terkait kasus dengan penyelewengan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada tahun anggaran 2015 dan 2016. Usai diperiksa penyidik, Daw mengaku pemeriksaan terhadap dirinya karena ada beberapa laporan keuangan tidak sinkron. Dia menilai laporan keuangan itu hanya kesalahan administrasi yang sifatnya bisa diperbaiki. (magnetberita.com, di akses pada 5 Mei 2017).

Selain itu ada kasus lain terkait dengan penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang dilansir dari berita Online menuturkan bahwa Kejaksaan Cabang Lappariaja Kejari Bone menahan Syamsuddin, Alfian Kiay mengatkan tersangka yang merupakan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lappariaja diduga telah menyalahgunakan dana BOS dan dana gratis tahun anggaran 2014 lalu. (sindonews.com, di akses pada 27 Juli 2016).

Selain kasus diatas fenomena yang terjadi dilapangan yaitu pada SD Negeri Pamoyanan, bahwa dana bantuan operasional sekolah yang di dapat dari pemerintah sebanyak Rp.144,000.000/ tahun sedangkan alokasi dari dana BOS untuk pemeliharaan sarana prasarana sesuai dengan peraturan sebesar 20% dari

dana operasional sekolah (BOS) tersebut, maka jumlah untuk pemeliharaan sarana prasarana sebesar RP. 28.800.000 sedangkan kondisi sarana prasarana di sekolah tersebut relatif tidak memenuhi standar yang ada dengan kondisi bangunan yang tidak terawat seperti dalam contoh gambar dibawah, begitu pula prasarana yang lainnya termasuk sarana bangku dan peralatan yang lain masih banyak ditemukan belum memiliki standar kualitas yang baik dan masih banyak ditemukan dalam gudang yang belum di perbaiki. Adapun daftar sarana prasarana seperti dalam tabel di bawah ini :

Gambar.1.1





Contoh diatas merupakan pemeliharaan sarana prasarana yang kurang baik yang disebabkan oleh lemahnya pengelolaan keuangan dana BOS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak sekolah yang diakibatkan oleh SDM yang kurang memiliki kompetensi dalam mengelola keuangan BOS serta belum memahami aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan dana BOS terbukti bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan pihak sekolah masih dilakukan manual tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dibawah ini jurnal yang mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh :

Tabel 1.2

Jurnal Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian,Tahun	Hasil	Perbedaan
1	Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kepada stakeholder di sd islam binakheir (2015)	Sudah cukup baik	Kualitatif
2	analisis manajemen sarana prasarana dan disiplin kerja serta pengaruhnya terhadap kinerja pegawai pada dinas kebersihan kota pangkalpinang (2017)	Sudah cukup baik	Kualitatif
3	analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (apbs) terhadap partisipasi orang tua murid (2010)	Berpengaruh	Varibel y
4	pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama negeri se-kecamatan pengasih kabupaten kulon progo (2011)	Sudah baik	Kualitatif
5	analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (bos) di sekolah dasar negeri 3 gerunung (2016)	Cukup baik	Kualitatif

Sumber: diolah penulis, 2018

Berdasarkan uraian masalah dan hasil penelitian terdahulu yang telah penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana operasional sekolah (BOS) terhadap pemeliharaan sarana prasarana dan melakukan penelitian pada sekolah-sekolah yang terdapat di Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi dengan mengambil judul **“PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TERHADAP PENINGKATAN SARANA PRASARANA DI SDN SE-KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN SUKABUMI”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pengadaan saran dan prasarana belum dilakukan dengan baik atau belum sesuai dengan kebutuhan sekolah dan bantuan dari pemerintah kadang kurang sesuai dengan apa yang sedang di butuhkan sekolah tersebut.
2. Ada kecenderungan bahwa pemeliharaan saran dan prasarana sedikit dikesampingkan
3. Kurangnya pengetahuan tentang cara penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sehingga kualitas/kondisinya menjadi kurang baik, tidak awet dan tidak siap pakai

4. Masih banyak sekolah yang belum menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah
5. Akuntabilitas dan operasional sekolah di mungkinkan tidak transparan
6. Pihak Sekolah dianggap belum transparan dalam mengungkapkan laporan keuangan dana bantuan operasional sekolah
7. Masih banyak masalah tentang pengelolaan dana bantuan operasional sekolah yang tidak akuntabilitas dan transparan

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah penulis uraikan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sejauh mana Akuntabilitas pengelolaan dana operasional sekolah (BOS) berpengaruh terhadap pemeliharaan sarana prasarana?
2. Sejauh mana Transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di sekolah (BOS) berpengaruh terhadap pemeliharaan sarana prasarana ?
3. Sejauh mana Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana sekolah (BOS) berpengaruh terhadap pemeliharaan sarana prasarana?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk melihat apakah akuntabilitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) mempunyai pengaruh terhadap kualitas sarana prasarana
2. Untuk melihat apakah transparansi pengelolaan dana operasional sekolah (BOS) mempunyai pengaruh terhadap pemeliharaan sarana prasarana.
3. Untuk melihat apakah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana operasional sekolah (BOS) mempunyai pengaruh terhadap pemeliharaan sarana prasarana.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian ini merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut :

3.2.1 Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, diantaranya :

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana operasional sekolah terhadap kualitas sarana prasarana.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi pendidik maupun pemerintah tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah terhadap kualitas sarana prasarana.
 - c. Dapat digunakan sebagai referensi dan masukan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

2. Bagi Instansi

- a. Dengan menerapkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) Terhadap kualitas Sarana Prasarana berarti sekolah telah mengikuti peraturan yang telah ditentukan, dengan begitu segenap pihak yang terkait (stakeholder) memperoleh informasi baik keuangan maupun non keuangan yang up to date, valid, relevan dan dapat diandalkan dengan standar akuntansi keuangan.
- b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan ataupun evaluasi kepada pihak yang terkait (stakeholder) tentang pentingnya Petunjuk dan Teknis Penggunaan Dana BOS disekolah.
- c. Bagi akademisi
Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak akademisi maupun pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik yang sama.

3.2.2. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, diantaranya :

1. Bagi Penyelenggara sekolah

Sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan untuk kemajuan sekolah, bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan sekolah dalam mengelola keuangan sekolah, dapat lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana operasional sekolah(BOS)

terhadap kualitas sarana prasana sehingga dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, sekolah, dan pemerintah.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai alat pemberi informasi mengenai transparansi sekolah, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada periode berikutnya, masyarakat mendapatkan informasi mengenai program atau kegiatan yang telah dilakukan oleh sekolah juga dapat mengetahui pengelolaan Dana operasional sekolah (BOS) dan dapat merasakan manfaat dari BOS secara langsung.